



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

**REWAKO
GOWA!**





KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Bappeda. Kinerja Bappeda diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Bappeda,

KEPALA BAPPEDA

SUJJADAN, S.STP.M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19770614 199511 1 001



KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang.....	1
b. Gambaran Umum Organisasi.....	1
c. Isu Strategis.....	3
d. Strategi Organisasi.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
a. Tujuan dan Sasaran.....	5
b. Arah Kebijakan dan Strategi.....	6
c. Indikator Kinerja Utama.....	7
d. Perjanjian Kinerja.....	8
e. Standar Penilaian Kinerja.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
a. Capaian Kinerja Organisasi.....	13
b. Upaya Perbaikan pada Perencanaan Berikutnya.....	25
c. Realisasi Anggaran.....	26
BAB IV PENUTUP.....	29
LAMPIRAN.....	30



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintah daerah, salah satu prinsip mendasar yang harus dipenuhi adalah prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas pemanfaatan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah atas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan

Sebagai perwujudan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban membuat dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasannya pada setiap akhir tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Gowa

B. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Gowa.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

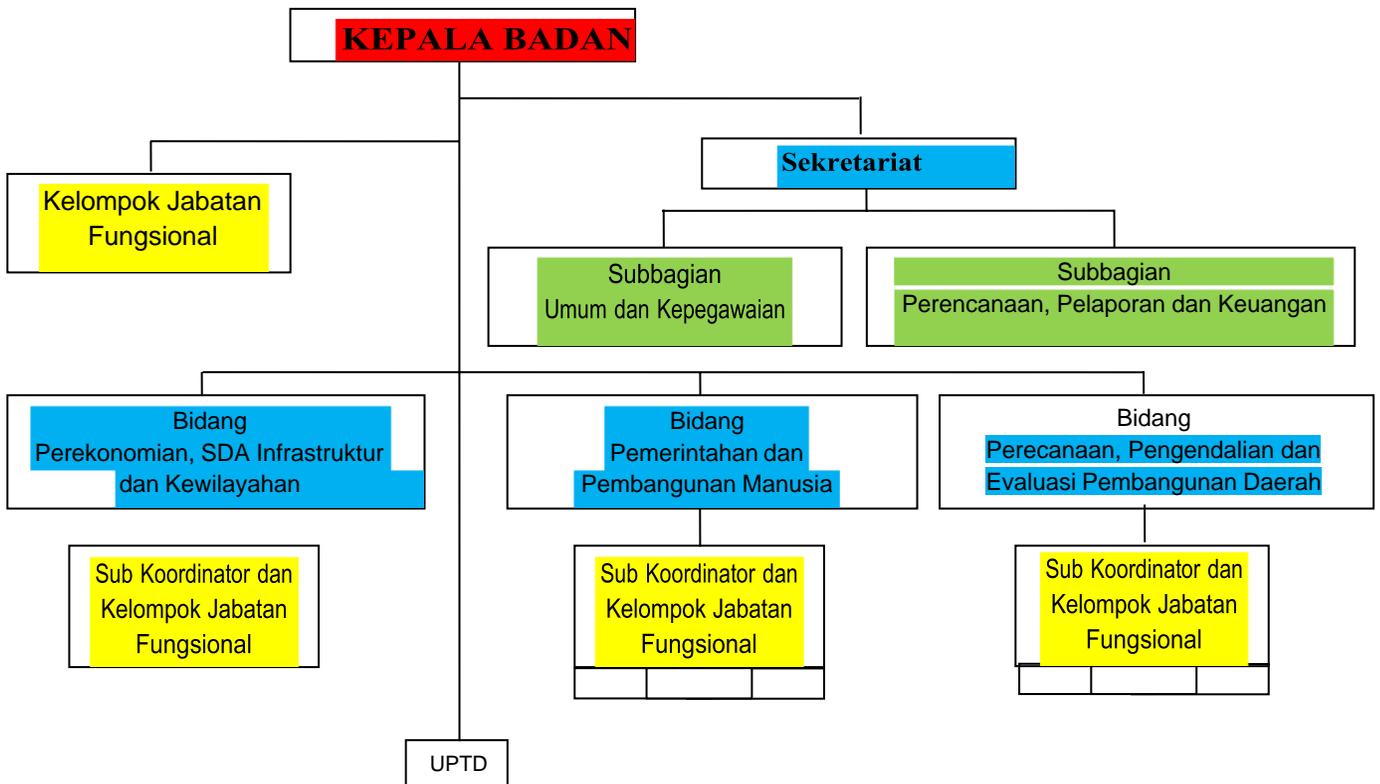




Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Pelaksanaan kebijakan Urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Pelaksanaan Administrasi Badan

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB.GOWA





Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan pendidikan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Pembina Tk. I	IV/b	2 Orang
2	Pembina	IV/a	4 Orang
3	Penata Tk.I	III/d	7 Orang
4	Penata	III/c	4 Orang
5	Penata Muda Tk.I	III/b	5 Orang
6	Pengatur Tk.I	II/d	1 Orang
7	Pengatur	II/c	1 Orang
Jumlah			23 Orang

C. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang perlu segera diatasi melalui berbagai pendekatan strategis agar mampu memecahkan setiap permasalahan. Isu-Isu yang strategis yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa di antaranya adalah :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia perencana yang belum optimal
2. Partisipasi masyarakat dalam perumusan Program Perencanaan Pembangunan masih rendah
3. Koordinasi antar SKPD belum optimal
4. Penerapan transparansi dan akuntabilitas hasil perencanaan pembangunan daerah belum efektif
5. Konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD belum maksimal
6. Konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran belum maksimal



7. Ketersediaan data base pembangunan masih kurang
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum optimal
9. Koordinasi Pengawasan pemanfaatan ruang belum optimal

Berdasarkan analisa isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Badan / Dinas selama 5 tahun ke depan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 sebagai upaya ikut serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gowa.

D. Strategi Organisasi

Strategi merupakan kebijakan, kegiatan, dan program, keputusan dan pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang Perencanaan sehingga semua permasalahan-permasalahan yang timbul bisa segera diatasi.

Usaha yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan kinerja di bidang Perencanaan dilakukan dari berbagai aspek yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Pada aspek internal, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Gowa melakukan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja seperti Kebutuhan computer/Laptop dan Print Selain itu, data dan informasi berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan hal yang paling penting adalah pembinaan budaya organisasi ke arah birokrasi yang profesional. Kedua, pada aspek proses, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan hasil kerja (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa. Rencana kinerja menggambarkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

A. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Badan / Dinas Tahun 2021 – 2026 mengacu pada Misi ke Empat tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021–2026 yaitu:

Misi ke 4 : Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik.

Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akutabel yang melayani efektif dan efisien.

**Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kapabilitas dan Akutabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang urusan Perencanaan menetapkan tujuan dan saran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026. Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa di antaranya adalah :

1. Meningkatnya Kualitas dan Implementasi Perencanaan Pembangunan
2. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappeda



Adapun Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa antara lain :

1. Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan
3. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappeda

Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas dan Implementasi Perencanaan Pembangunan	Persentase Pemenuhan nilai SAKIP Kabupaten pada Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja			100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	65.02-75	65.02-75	65.02-75	65.02-75	65.02-75
			Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	17.50	17.50	18.00	18.00	18.75
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	100	100	100	100	100
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappeda	Indek SKM			89-100	89-100	89-100	89-100	89-100
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappeda	Indek SKM	89-100	89-100	89-100	89-100	89-100

B. Arah Kebijakan dan Strategi

untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.



Adapun strategi Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa sebagai berikut :

1. .Meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan kualitas layanan publik melalui pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penyederhanaan birokrasi penerapan manajemen kinerja, pengelolaan keuangan dan asset
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi

sedangkan arah kebijakan Badan Badan Perencanaan Pembanguna daerah Kabupaten Gowa untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan efektifitas system dan prosedur pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan daerah sistem pengendalian intern (SPI) dan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi organisasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Gowa adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja Badan / Dinas pada akhir tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS dan organisasi.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja PNS. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organsiasi.

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Badan Perencanaan Pembangun Daerah Nomor : 47 /X/2021/Bappeda Tahun 2021 Adapun indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Gowa yaitu :



Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Persentase Pemenuhan nilai SAKIP Kabupaten pada Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	64,17	66,17	68.16	70.14	72.00
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam APBD	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappeda	Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci 4 Indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2022.



**Perjanjian Kinerja Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Gowa Tahun 2022**

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas dan Implementasi Perencanaan
Pembangunan
Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	21.00	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	309.759.600
	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	17.50		
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	100	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	146.620.900



Tujuan 2 : Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Bappeda

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappeda	Indek SKM	89-100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.837.87.390

E. Standar Penilaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Bappeda Kabupaten Gowa maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:



Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Bappeda Kabupaten Gowa selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Gowa yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Bappeda Kabupaten Gowa. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.



Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Bappeda Kabupaten Gowa dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Gowa dan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Gowa berdasarkan Keputusan Kepala Bappeda tentang IKU.

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Capaian kinerja Bappeda menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Bappeda sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Bappeda. Pengukuran kinerja Bappeda dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda meliputi:



Sasaran 1:

Meningkatnya Kualitas Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator :

- Nilai Sakip Kota Komponen Perencanaan Kinerja
- Nilai Sakip Kota Komponen Pengukuran Kinerja

Sasaran 2 :

Meningkatkan Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan

Indikator :

- Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi Target Tahunan

Sasaran 3 :

Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappeda

Indikator:

- Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2022 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :



Tabel. 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KETERANGAN
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	21,00	20,95	99,08	
	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	17,50	16,56	94,64	
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	100	77,27	77,27	
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappeda	Indeks SKM	89-100	90	90	

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 90 %** pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 85%.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022.

Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda 2021 – 2026. Adapun realisasi dan capaian kinerja Bappeda apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:



Tabel 3.2

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja		20,95 %					99,08 %				
	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja		16,56 %					94,64 %				
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan		77,27 %					77,27 %				
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappeda	Indeks SKM		90%					90 %				

Pengukuran kinerja dari tahun 2022 – 2026 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

- a. **Sasaran strategis** : Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan
 1. **Indikator kinerja 1** : Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja
 2. **Indikator kinerja 2** : Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja
- b. **Sasaran strategis** : Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan
Indikator kinerja 3 : Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan
- c. **Sasaran strategis** : Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappeda
Indikator kinerja 5 : Indeks SKM

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun..... dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja					
			2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Pencapaian Kinerja	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	22.50		20,95				



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja					
			2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	2	3	5	6	7	8	9	10
	Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	18,75		16,56				
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	100		77,27 %				
3.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappeda	Indeks SKM	89-100(sangat baik)		90 Sangat baik				

Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

Tabel 3.4

Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	
			2022	Target	Realisasi
				2022	2022
1	2	2	4	5	6
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	20,95		
		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	16,56		



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	
			Kinerja	Target	Realisasi
			2022	2022	2022
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target	77,27		
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappeda	Indek SKM	90 (sangat baik)		

4. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan.

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2022 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Strategis : Meningkatkan Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan (rata2 capaian indikator sekitar 98% sesuai yang diperjanjikan walaupun belum dapat dicapai secara maksimal (100%) karena masih ada
 - a. Indikator 1 : Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja (**Cukup Berhasil**) hanya tercapai 20,95 sesuai dengan target yaitu 21.00
 - b. Indikator 2 : Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja (**Cukup Berhasil**) Hanya tercapai 16,56 dari target sebesar 17,50 Cukup berhasil dicapainya target sebesar 17.50
- 2) Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan (rata2 capaian indikator sekitar 77,27.%) sesuai yang diperjanjikan walaupun belum dapat dicapai secara maksimal (100%).



- a. Indikator 1 : Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan (**Cukup Berhasil**) telah tercapai 77,27% dengan target yaitu 100 %

3.Sasaran Strategis : Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappeda

- b. Indikator Indeks SKM (**Cukup Berhasil**) telah tercapai 90,% dengan target yaitu 100 %

5. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Bappeda dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Bappeda adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Bappeda dalam pelaksanaan program kegiatan:

Tabel 3.5

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	21,00	20,95	99,08%	309.759.600	305.674.394	98,68	
	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	17,50	16,56	94,00%				
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	100%	77,27%	77,27%	146.620.900	144.209.600	98,36	





SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan	Indeks SKM	89-100	90	90%	3.837.087.390	3.322315.077	87,86%	

Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif

< 100%, maka penggunaan dana belum efektif

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa belum ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- 1) Indikator Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja dengan capaian kinerja 99,08% dan capaian anggaran 98,68%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 1,60% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 100%
- 2) Indikator Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja dengan capaian kinerja 94,64% dan capaian anggaran 98,68%, menunjukkan walaupun ada efisiensi anggaran 1,32% akan tetapi belum efektif karena tidak mampu mencapai kinerja sehingga perlu adanya peningkatan upaya-upaya untuk mencapai kinerja dengan program dan kegiatan yang selaras dengan kinerja yang diharapkan.
- 3) Indikator Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan dengan capaian kinerja 77,27 % dan capaian anggaran 98,36%, menunjukkan walaupun ada efisiensi anggaran 1,64% akan tetapi belum efektif karena tidak mampu mencapai kinerja sehingga perlu adanya peningkatan upaya-upaya untuk mencapai kinerja dengan program dan kegiatan yang selaras dengan kinerja yang diharapkan.
- 4) Indikator Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan capaian kinerja 90% dan capaian anggaran 86,86%, menunjukkan walaupun ada efisiensi anggaran 13,14% akan tetapi belum efektif karena tidak mampu mencapai kinerja sehingga perlu adanya peningkatan upaya-upaya untuk mencapai kinerja dengan program dan kegiatan yang selaras dengan kinerja yang diharapkan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Tabel. 3.6

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai sakiP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	99,08	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPDP (persen)	100 %	100 %	100 %	Monitoring dan evaluasi keselarasan program RPJMD dan RKPDP
	Nilai sakiP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	94,64		Tingkat Konsistensi Dokumen Penjabaran RKPDP ke dalam APBD (persen)	100 %	100 %	100 %	Monitoring dan evaluasi berkala hasil pelaksanaan RKPDP
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD,yang tercapai atau melebihi target tahunan	100	Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Indikator Sasaran RPJMD,yang tercapai atau melebihi target tahunan	100 %	77,27 %	77,27 %	Meningkatkan komponen ketepatan waktu tahapan perencanaan perangkat daerah mitra
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan bappeda	Indeks SKM	89-100 (sangat baik)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	90 %	90 %	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan
								Meningkatkan penatausahaan barang milik daerah
								Meningkatkan pelayanan kesekretaria tan



Berdasarkan tabel 3.6 tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan

Indikator 1: Nilai Sakip Kota Komponen Perencanaan Kinerja , dengan target 21.00 **C u k u p B e r h a s i l** tercapai sebesar 20,95 atau tercapai 99,08%.

Indikator 2: Nilai Sakip Kota Komponen Pengukuran Kinerja , dengan target 17.50 **C u k u p B e r h a s i l** tercapai sebesar 16.56 atau tercapai 94,64%.

Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan

Indikator 3 : Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target, dengan target 100 % **k u r a n g b e r h a s i l** dengan capaian sebesar 77,27 %

Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- **Sasaran 3** : Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappeda

Indikator 4 : Indeks SKM, dengan target 89-100 (sangat Baik) **C u k u p b e r h a s i l** dengan capaian sebesar 90 %

Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



1) **Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :**

Sasaran 1 : Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan

Indikator 1 : Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja dengan target 21.00 telah **berhasil** tercapai sebesar 20,95. atau tercapai 99,08%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Indikator 2 : Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja dengan Target 17.50 telah **cukup berhasil** tercapai sebesar 16.56 atau tercapai 94,64%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembagunan

Indikator 3 : Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan dengan target 100% **kurang berhasil**

Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappeda

Sasaran 3 : **Indikator 4** : Indeks SKM dengan target 100 % telah **Cukup berhasil** Atau tercapai 90 % atau tercapai 90 % indicator ini dapat dilaksanakan melalui Program ::

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



B. Upaya Perbaikan Pada Perencanaan Berikutnya :

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Bappeda pada tahun 2022 dengan capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu:

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

1. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan secara komprehensif dan bersinergi antar tahapan, sehingga dapat memotret secara objektif gap/kesenjangan untuk segera dilakukan perbaikan. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pengendalian dan evaluasi perencanaan dilakukan melalui 3 tahapan yaitu:
 - a. *Ex-ante evaluation* yaitu pengendalian dan evaluasi dilakukan pada saat penyusunan dokumen perencanaan;
 - b. *On-going evaluation* yaitu pengendalian dan evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan perencanaan
 - c. *Ex-post evaluation* yaitu pengendalian dan evaluasi dilakukan pada hasil perencanaan.

Dengan pengendalian dan evaluasi pada saat penyusunan perencanaan, terpantau apakah perencanaan pembangunan daerah sudah sesuai tahapan, sesuai sistematika dan *timeline* yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Apakah perencanaan pembangunan tahunan telah selaras dengan RPJMD. Selanjutnya pengendalian dan evaluasi yang dilakukan pada hasil perencanaan digunakan sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya.

2. Pada saat verifikasi rancangan Renja dan rancangan akhir Renja perangkat daerah mitra, sekaligus harus dilakukan verifikasi indikasi program pada dokumen RTRW yang harus dilaksanakan oleh perangkat Daerah pada tahun ke-n, sehingga amanat Perda RTRW terlaksana sesuai *timeline* yang tercantum dalam dokumen RTRW;
3. Meningkatkan kualitas pendampingan dan verifikasi perencanaan perangkat daerah. Proses pendampingan dan verifikasi terhadap perencanaan perangkat daerah kurang optimal dalam menyentuh



detail substansi, karena seringkali perangkat daerah tidak disiplin/tidak tepat waktu pada *timeline* yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) yaitu mengumpulkan *draft* Renstra pada saat pelaksanaan verifikasi, yang seharusnya dikumpulkan pada H-10. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, rancangan akhir Renstra dan Renja harus disampaikan ke Bappeda paling lambat 1 minggu setelah penetapan Perda RPJMD dan Perwal tentang RKPD, dan paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan akhir harus diverifikasi oleh Bappeda. Ke depan perlu dilakukan pembenahan metode verifikasi perencanaan perangkat daerah agar lebih optimal;

4. Meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap proses perencanaan pembangunan mulai dari tahapan, sistematika, ketepatan waktu, dan keselarasan antar dokumen. Perencanaan pembangunan perangkat daerah seringkali tidak sesuai dengan kaidah yang diamanatkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak tepat waktu tiap tahapannya;
5. Optimalisasi kemampuan SDM pelaksana verifikasi perencanaan perangkat daerah dengan mendorong tersedianya fungsional Perencana yang secara berkala melakukan pelatihan dan Bimtek Perencanaan untuk *upgrade* kompetensi dan wawasan terkait perencanaan pembangunan;

Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda.

C. Realisasi Anggaran.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar 87,86.% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Tabel. 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Sasaran : Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan			
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	309.759.600	305.674.394	98,68
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	309.759.600	305.674.394	98,68
2	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan			
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	146.620.900	144.209.600	98,36
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	75.828.600	75.599.400	99,70
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	32.919.900	31.210.900	94,81
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahaan	37.872.400	37.399.300	98,75
2	Sasaran : Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappeda			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.837.087.390	3.322.315.077	86,58
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	255.825.520	247.927.400	96,91
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.361.710.652	1.877.073.712	79,48
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.000.000	23.984.000	99,93
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	817.212.143	806.143.473	98,65
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	235.674.075	235.314.780	99,85



No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.245.000	54.994.979	92,83
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	83,420.000	76.876.733	92,16
	TOTAL	4.293.467.890	3.772.199.071	87,86



BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum tentang Keberhasilan Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Gowa merupakan media komunikasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Bappeda Kabupaten Gowa. Media komunikasi ini sangat penting untuk menginformasikan sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Gowa pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Gowa 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Bappeda Kota Malang pada tahun-tahun mendatang.

Keberhasilan capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Gowa pada tahun 2022 dengan 3 program yang terdiri dari 11 kegiatan sebesar 87,86%,

4.2 Kendala Pelaksanaan

Dalam upaya mencapai tujuan, sasaran dan program, Bappeda Kabupaten Gowa pada tahun 2022 melaksanakan 11 Kegiatan dengan target capaian kinerjanya masing-masing.

Dari kegiatan dan program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran yang tertuang didalam Renstra Bappeda Kabupaten Gowa 2021-2026, kinerja Bappeda Kabupaten Gowa pada tahun 2022 menunjukkan kategori **Cukup Berhasil** dengan rata-rata capaian 95 %. Namun demikian dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya mencapai sasaran ditemui beberapa kendala sebagai berikut:



Belum optimalnya penerapan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, terutama jadwal waktu tiap tahapan perencanaan yang belum ditaati oleh perangkat daerah;

1. Kurangnya data dan informasi yang mendukung perencanaan;
2. Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap seluruh proses perencanaan pembangunan daerah
3. Seringnya perubahan kebijakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan perencanaan pembangunan dan pemerintahan daerah;
4. Kurangnya optimalnya pemahaman dan antusiasme perangkat daerah dalam memanfaatkan dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan;

Adapun permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Bappeda meningkatkan kinerja aparatur, kompetensi dan pelayanan di bidang perencanaan Upaya Bappeda untuk mengatasi berbagai persoalan diatas sebagai berikut:

1. Menyusun agenda kerja proses perencanaan pembangunan sampai dengan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan proses perencanaan pembangunan;
2. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur terutama yang bertugas di bidang sektoral tentang perencanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatkan kualitas pendampingan/asistensi kepada perangkat daerah mitra dalam setiap tahapan penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah;
4. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil Renja dan Renstra perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya;
5. Rapat koordinasi dan sinkronisasi antara bidang sektoral dengan Kepala Bappeda secara berkala untuk membahas progres pelaksanaan pendampingan penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah;



6. Melaksanakan kaidah monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan mulai dari *Ex-ante*, *On-going* sampai dengan *Ex-post* secara berkelanjutan;
 - a. Menyempurnakan juknis Musrenbang sehingga kualitas usulan Musrenbang mulai tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan tingkat kota memenuhi kualifikasi dan merupakan usulan kegiatan yang bersifat prioritas di masing masing kelurahan;
 - b. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dengan bimbingan teknis, diklat, sosialisasi, diskusi ataupun seminar tentang perencanaan pembangunan

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Gowa ini dapat menjadi bahan atau informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Gowa . Diharapkan pula pada tahun mendatang kinerja Bappeda Kabupaten Gowa dapat semakin ditingkatkan searah dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Gowa selaku perencana dan koordinator pembangunan di Kabupaten Gowa.